

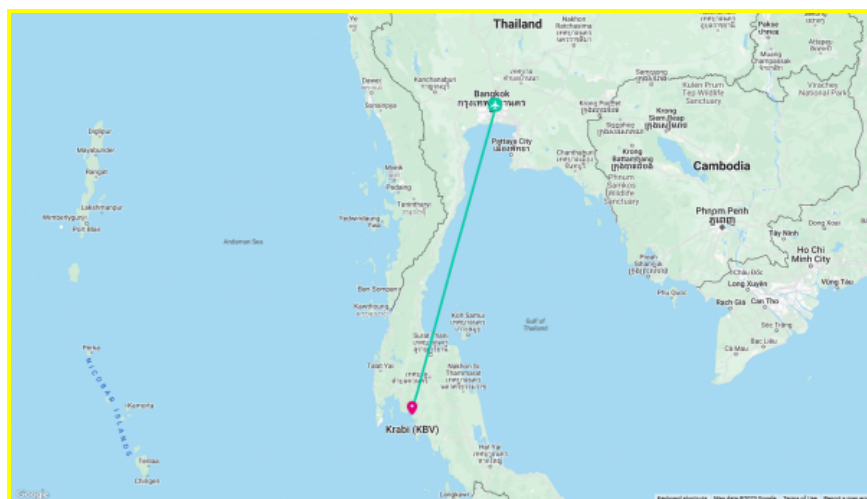
BAB II

DINAMIKA PLTU BATU BARA DI KRABI THAILAND

Pada bab ini difokuskan pada penjelasan terkait profil wilayah krabi sebagai salah satu situs yang dilindungi dalam Ramsar Convention on Wetlands. Sebagai situs yang dilindungi, lingkungan Krabi berpotensi mengalami kerusakan dengan adanya rencana pembangunan PLTU batu bara oleh Pemerintah Thailand. Namun, rencana tersebut mengalami berbagai penolakan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari organisasi Greenpeace Thailand.

2.1. Profil Wilayah Provinsi Krabi

Krabi merupakan provinsi yang terletak di wilayah Selatan Thailand. Provinsi ini meliputi area seluas 4.708 kilometer persegi dan berjarak sejauh 814 km dari Ibukota Bangkok (Tourism Authority of Thailand, 2020).



Gambar 2.1. Jarak Provinsi Krabi dengan Ibukota Thailand

Sumber: Situs Web FreedomDIVE, 2024.

Krabi sendiri memiliki arti “pedang” yang menurut legenda bahwa terdapat sebuah pedang kuno sebelum provinsi tersebut didirikan dan pedang telah menjadi simbol wilayah Krabi. Secara geografis pegunungan Krabi terbagi menjadi dua yaitu dataran tinggi dan dataran rendah di dataran utama. Menurut administrasi Provinsi Krabi mencakup lebih dari 130 pulau besar dan kecil di Laut Andaman (Tourism Authority of Thailand, 2020). Provinsi ini memiliki garis pantai sekitar 160 kilometer dan terdapat sekitar 154 pulau dan 13 diantaranya berpenghuni. Berdasarkan wilayah administratif, terdapat 8 kabupaten/distrik diantaranya adalah: Distrik Mueang yang terdiri dari 10 kecamatan dan 66 desa, Distrik Koh Lanta yang terdiri dari 5 kecamatan dan 36 desa, Distrik Ao Luek yang terdiri dari 9 kecamatan 51 desa, Distrik Lam Thap yang terdiri dari 4 kecamatan dan 28 desa, Distrik Khao Phanom yang terdiri dari 6 kecamatan dan 54 desa, Distrik Khlong Thom yang terdiri dari 7 kecamatan dan 68 desa, Distrik Plai Phraya yang terdiri dari 4 kecamatan dan 33 desa, serta Distrik Nuea Khlong yang terdiri dari 8 kecamatan dan 57 desa (Krabi.thailocallink, n.d.).

Provinsi yang telah menjadi tempat wisatawan berkunjung baik lokal maupun internasional ini memiliki berbagai objek wisata yang indah seperti Khai Khanap Nam, Tham Sadet, dan Tham Suea merupakan objek wisata berbentuk gua dan kuil, selain itu terdapat taman nasional yang bernama Than Bok Khorani dan Khao Phanom, dan tentunya berbagai pantai seperti Ao Nang, Railay, serta yang paling terkenal adalah Pulau Phi-Phi (Tourism Authority of Thailand, 2020).



Gambar 2.2. Peta Wisata Krabi

Sumber: Tourism Authority of Thailand, 2020.



Gambar 2.3. Pulau Phi Phi

Sumber: Tourism Authority of Thailand, 2020.

Selain menjadi tempat pariwisata di Thailand, Krabi juga merupakan salah satu situs lahan basah yang terdaftar dalam Ramsar Convention. Di tahun 2001, Muara Sungai Krabi didaftarkan sebagai lahan basah penting internasional di antara belasan situs Ramsar yang ada di Thailand, meliputi area seluas 21.300

hektar yang terdiri dari dataran lumpur, pantai berpasir, hutan bakau, serta kanal di depan Kota Krabi (Higonnet, 2014).

2.1.1. Muara Krabi dalam Ramsar Convention

Ramsar Convention on Wetlands merupakan perjanjian konvensi lahan basah yang menyediakan kerangka kerja atas tindakan nasional dan kerjasama internasional untuk konservasi dan penggunaan lahan basah dan sumber dayanya secara bijaksana. Konvensi ini berada di bawah naungan UNESCO dan mulai diadopsi pada tahun 1971 di kota Ramsar, Iran serta berlaku pada tahun 1975. Ramsar Convention memiliki tiga pilar konvensi sebagai prinsipnya yaitu:

1. Para pihak yang memiliki kontrak berkomitmen untuk bekerja menuju penggunaan semua lahan basah secara bijaksana.
2. Menetapkan lahan basah yang sesuai untuk daftar lahan basah penting internasional serta memastikan pengelolaan yang efektif.
3. Bekerja sama secara internasional dalam lahan basah lintas batas, sistem lahan basah bersama, dan spesies bersama (Ramsar Convention on Wetlands, 2007).

Pemerintah Thailand meratifikasi Ramsar Convention pada tahun 1998 dan menjadikan Thailand sebagai pihak ke-110. Kemudian di tahun 2001 Muara Sungai Krabi didaftarkan pada perjanjian tersebut dan merupakan situs lahan basah ke 1100 yang terdaftar di Ramsar Convention (Janekarnkij, 2010). Berbicara mengenai kepatuhan dari komitmen dalam Ramsar Convention, perjanjian ini pada dasarnya tidak memiliki sanksi hukuman atas pelanggaran

dalam memenuhi komitmen perjanjian. Namun, ketentuan-ketentuannya merupakan perjanjian yang serius dan mengikat dalam hukum internasional (Ramsar Convention Secretariat, 2016, 14). Hal ini sesuai dalam hukum lingkungan internasional yang pada dasarnya berkembang diantara dua prinsip yang saling bertentangan. Pertama, negara mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alamnya. Kedua, negara tidak boleh menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan (Soto, 1996).

Secara karakteristik, situs ini berlokasi meliputi dua distrik yaitu Muang dan Nua Khlong, situs ini meliputi 45 desa dari delapan subdistrik dan dua kotamadya. Situs seluas 21.299 ha ini terdiri dari kuburan kerang yang berusia 45 juta tahun, hutan bakau, dataran lumpur, pantai berpasir serta kanal. (Janekarnkij, 2010).



Gambar 2.4. Wilayah hutan bakau di Muara Sungai Krabi

Sumber: Peter Prokosch, 2014.

Dalam hal ekonomi, situs ini telah memberikan banyak manfaat khususnya bagi penduduk lokal seperti hutan bakau yang menghasilkan dua jenis produk yaitu sumber daya tanaman sebanyak 22% dan hewan air sebanyak 78%. Sumber daya tanaman yang dapat diolah baik dalam produk kayu seperti kayu bakar, konstruksi rumah, alat pancing dan produk non kayu seperti makanan liar dan obat-obatan berbasis tanaman sedangkan untuk hewan air di wilayah hutan bakau terdiri dari rajungan, udang galah, ikan kerabu, da kakap merah. Selain sumber daya yang menjadi penunjang perekonomian, pariwisata juga menjadi salah satu faktor. Meskipun kebanyakan lokasi wisata yang terkenal berada di luar area situs tetapi di tahun 2003 tercatat jumlah pengunjung mencapai angka 1,458 juta orang dan 30% diantaranya tinggal atau menginap di situs tersebut. Adapun perkiraan pengeluaran untuk setiap pengunjung sebesar 68\$/ hari dengan rata-rata jangka waktu berkunjung sekitar 4-5 hari. Kemudian situs ini juga terdapat berbagai akuakultur seperti tambak udang, budidaya ikan dan di bidang pertanian terdapat perkebunan karet dan kelapa sawit yang beroperasi di tingkat pasar lokal hingga nasional serta sebagian besar untuk konsumsi rumah tangga (Janekarnkij, 2010).

Krabi sebagai provinsi yang memiliki berbagai lokasi pariwisata serta turut menjadi bagian dari perjanjian lahan basah internasional atau Ramsar Convention on Wetlands tentunya membuat Provinsi Krabi menjadi bagian penting dari Thailand. Akan tetapi, Krabi harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah bahwa akan dibangunnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang tentunya akan berdampak bagi provinsi tersebut. Hal ini juga

disebabkan dari lemahnya sifat perjanjian Ramsar yang tidak memberikan sanksi atas pihak yang melanggar.

2.2. Perkembangan PLTU batu bara Thailand

Perkembangan PLTU batu bara di Thailand diawali dengan adanya bisnis pertambangan lignit yang dimulai pada tahun 1917 pada masa pemerintahan Raja Rama VI setelah mempekerjakan ahli asing. Setelah menjelajahi Thailand dan melakukan survei, telah ditemukan potensi lignit di Distrik Mae Moh, Provinsi Lampang dan di Kecamatan Khlong Khanan, Distrik Nuea Khlong, Provinsi Krabi. Di Distrik Mae Moh sendiri, setelah dilakukan pengeboran berhasil ditemukan 120 juta ton lignit untuk ditambang dan dijual (อัจฉิมา, 2017). Pada tahun 1968 Pemerintah Thailand memberlakukan undang-undang untuk menggabungkan menjadi berbagai otoritas listrik seperti Otoritas Listrik Yanhee Otoritas Listrik Timur Laut, dan Otoritas Listrik Lignite menjadi satu badan yaitu Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) yang menjadi badan otoritas listrik sampai sekarang (EGAT, 2023). EGAT merupakan badan usaha milik negara yang berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Kementerian Keuangan Thailand. Badan usaha ini memiliki berbagai misi utama yaitu pembangkit listrik, perolehan listrik, dan penjualan listrik. Selain itu EGAT juga memiliki beberapa bisnis sampingan seperti bisnis operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, pemeliharaan transmisi, telekomunikasi, rekayasa dan konstruksi pembangkit listrik, serta bisnis di bidang kendaraan listrik (EGAT, 2024). Hingga saat ini EGAT telah melakukan berbagai capaian, adapun capaian-capaian yang telah dilakukan oleh EGAT dapat dilihat pada tabel berikut:

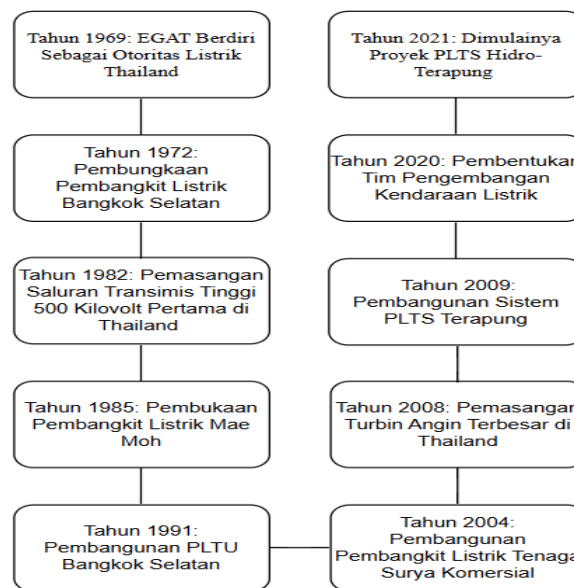


Diagram 2.1. Capaian Otoritas Listrik Thailand/EGAT

Sumber: Data diolah oleh penulis EGAT, 2024.

Dalam rencana investasi selama 5 tahun 2013-2017, total anggaran yang dikeluarkan sebesar 300 miliar Baht dengan distribusi anggaran tahun 2013 sebesar 37 miliar Baht, 2014 sebesar 104 miliar Baht, 2016 sebesar 78 miliar Baht, dan di tahun 2017 sebesar 81 miliar Baht. Anggaran sebesar 300 miliar Baht ini diinvestasikan berbagai proyek yang terdiri dari: Pembangkit Listrik Wang Noi Unit 4, Pembangkit Listrik Chana Unit 2, Pembangkit Listrik Bangkok Utara Unit 2, Pembangkit Listrik Tenaga batu bara Krabi dengan kapasitas 870 megawatt, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air Lam Takhong Unit 3 dan 4 (bangkokbiznews, 2013).

Provinsi Krabi merupakan wilayah pertama di Thailand yang menggunakan lignit sebagai bahan baku pembangkit listrik, dengan terdiri dari

tiga unit yang memiliki daya masing-masing sebesar 20 megawatt. Pembangkit listrik di Krabi ini dibangun pada tahun 1961 dan beroperasi pada tahun 1964, namun sempat dinonaktifkan pada tahun 1955 (Murakami, 2017). Dengan meningkatnya permintaan atas konsumsi listrik, EGAT selaku pihak yang memiliki otoritas mulai membangun pembangkit listrik tenaga panas dan menggunakan minyak sebagai bahan bakunya. Pembangkit listrik ini disetujui pada tahun 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004 (Charoenpanich, 2022).



Gambar 2.5. Pembangkit Listrik Berkapasitas 315 Megawatt di Provinsi Krabi

Sumber: Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), 2024.

EGAT menegaskan bahwa perlu membangun kembali pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Krabi sebesar 870 megawatt. Hal ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas sistem kelistrikan di wilayah tersebut, tingginya produksi dan permintaan listrik, mengurangi risiko pemadaman listrik, dan penggunaan batu bara yang jauh lebih murah dibanding gas alam dan mampu menurunkan

harga listrik (INN NEWS, 2015). Oleh karena itu, di tahun 2010 EGAT merilis Rencana Pengembangan Tenaga Listrik Thailand atau *Project Development Plan* (PDP 2010) yang menginformasikan akan membangun PLTU batu bara di Krabi sebagai salah satu dari empat proyek pembangkit listrik yang dibangun di wilayah selatan dengan total kapasitas 4.000 megawat (Greenpeace Thailand, n.d.). PDP sendiri merupakan rencana induk produksi listrik Thailand yang mencakup perencanaan penyediaan energi listrik jangka panjang selama 15-20 tahun. Dalam proses pembuatan PDP 2010 melibatkan berbagai pihak, berikut merupakan diagram yang bertujuan untuk menggambarkan proses pembuatan PDP 2010 serta garis waktu proses PLTU di Krabi.

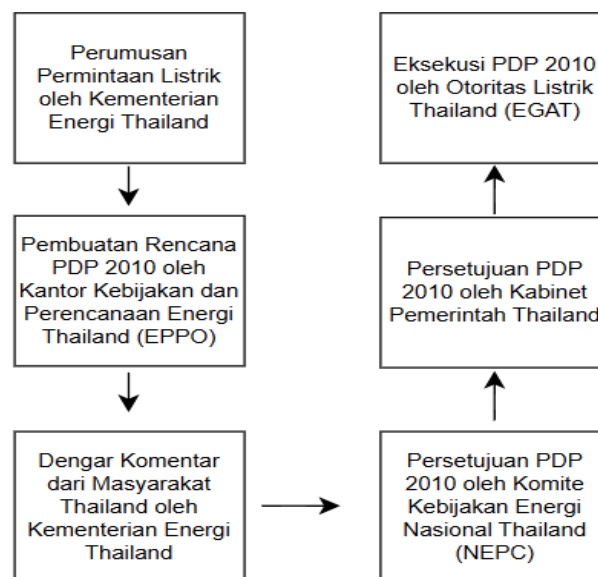


Diagram 2.2. Proses Pembuatan PDP 2010

Sumber: Data diolah oleh penulis /ThaiPBS, 2012.

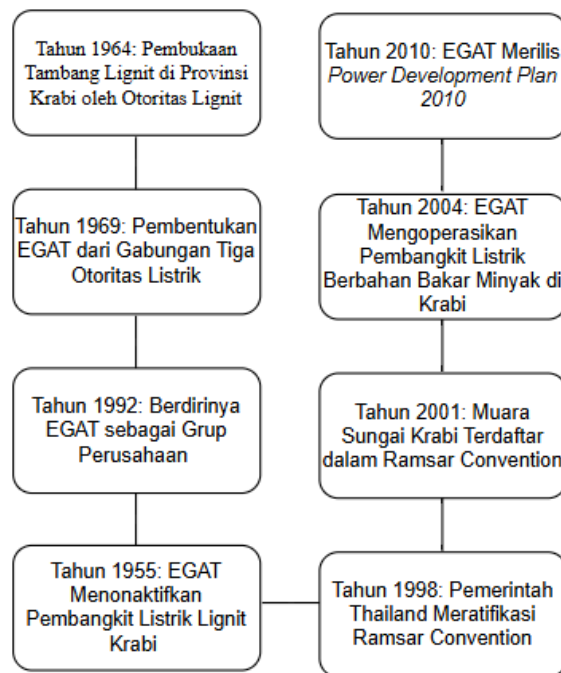


Diagram 2.3. Garis waktu PLTU Batu Bara Krabi

Sumber: Data diolah oleh penulis, EGAT, 2024.

Keputusan Pemerintah Thailand dalam menginisiasi proyek pembangunan PLTU batu bara tersebut memperlihatkan bahwa batu bara menjadi satu-satunya jawaban bagi Pemerintah Thailand atas kebutuhan energi yang ada di wilayah tersebut. Akibatnya, keputusan tersebut menuai berbagai respon dari beberapa pihak.

2.3. Respon terhadap Rencana Pembangunan PLTU Krabi

Pada 19 Januari 2013, sekitar 200 warga berkumpul untuk melakukan protes pembangunan PLTU, para warga yang merupakan masyarakat lokal berasal dari Desa Thung Sakhon, Kecamatan Pakasai, Distrik Nuea Khlong, Provinsi

Krabi tempat dimana PLTU akan dibangun. Dengan mengenakan pakaian serban berwarna hijau sebagai simbol, para warga desa ini siap menandatangani proyek pembangunan PLTU (MGR Online, 2013). Di tahun yang sama pada 11 Februari, masyarakat lokal kembali merespon pembangunan PLTU tersebut. Lebih dari 500 penduduk desa beserta pemimpin wilayah berkumpul tepatnya di Balai Provinsi Krabi. Masyarakat yang berkumpul memakai baju berwarna hijau serta membawa tanda dan simbol yang berisikan pesan penentangan pembangunan PLTU seperti “batu bara membawa bencana”. Salah satu perwakilan masyarakat yakni Chalit Sukhot mengatakan bahwa cara hidup penduduk desa berubah dikarenakan pembangunan PLTU tersebut, berbagai alasan kesehatan seperti beberapa warga yang mengalami penyakit pernafasan dan juga menderita kanker (MGR Online, 2013).

Di tahun yang sama, organisasi non-pemerintah yang aktif bergerak di bidang lingkungan yakni Greenpeace menginisiasi aksi penolakan dengan membentangkan spanduk bertuliskan “STOP COAL” di tebing Pantai Railay, Krabi.



Gambar 2.6. Aksi Protes Greenpeace di Pantai Railay, Krabi

Sumber: Situs Web Greenpeace Thailand 2013.

Aksi tersebut dilakukan guna mengkomunikasikan langsung kepada pemerintah bahwa sudah seharusnya pemerintah harus menghentikan proyek pembangunan PLTU batu bara, karena batu bara bukanlah jawaban untuk mengatasi krisis energi yang terjadi di Thailand saat itu (MGR Online, 2013).

Selain Greenpeace juga terdapat NGO lokal bernama Save Andaman From Coal yang merespon pembangunan ini dengan melakukan protes. Ammakrit Sirichutapornkul selaku ketua NGO tersebut sekaligus Presiden Dewan Industri Pariwisata Krabi mengatakan bahwa Krabi merupakan wilayah yang mengandalkan pariwisata dan pertanian sebagai basis perekonomian, dengan nilai ekonomi sebesar 330 miliar Baht di tahun 2012. Pembangunan PLTU ini akan membuat masyarakat menjadi sengsara dikarenakan kawasan wisata akan tertutup asap batu bara dan pencemaran air (Thaireform, 2015). Ammakrit juga melakukan

survei khususnya kepada wisatawan asing, sejumlah 624 wisatawan yang berasal dari 37 negara 88% berpendapat bahwa pembangkit listrik tersebut berbahaya bagi lingkungan dan 85% diantaranya tidak akan kembali lagi berkunjung ke Krabi apabila pembangkit listrik tersebut dibangun (Thaireform, 2015).

Selain melakukan survei kepada wisatawan asing, Save Andaman From Coal juga melakukan respon dengan melakukan aksi protes dan mogok makan di depan Kementerian Pariwisata dan Olahraga pada 10 Juli 2015, disaat yang bersamaan ketika Pemerintah Thailand membuka lelang untuk pembangkit listrik yang akan dibangun di Krabi. Ketika melakukan aksinya, Save Andaman From Coal juga memberikan pernyataan untuk menolak pembangunan pembangkit listrik tersebut bersama dengan 51 organisasi lingkungan lain seperti Green World Foundation, Seub Nakhasathien Foundation, Environmental Law Foundation (EnLAW), Working Group for a Just Cool World, Karen Study and Development Center, Lanna Bird and Nature Conservation Club, Group of lecturers, students and people for society and the environment, Community Organization Caravan of Nong Khai Province, Network of Mekong Community Organization Councils in 7 Northeastern Provinces (KSOC), Community Resource Centre, dan lain-lain (กองบรรณาธิการ, 2015).

Proses pembangunan proyek pembangkit listrik di Krabi sempat mengalami penundaan selama dua tahun yaitu pada tahun 2015-2017 dikarenakan gerakan protes anti pembangkit listrik yang semakin kuat. Namun di tahun 2017, Komite Kebijakan Energi Thailand atau National Energy Policy Council (NEPC) justru menyetujui keberlanjutan dari pembangunan pembangkit listrik tersebut.

NEPC yang diketuai oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menegaskan bahwa jika tidak ada pembangkit listrik baru yang dibangun di wilayah Selatan maka akan dapat menimbulkan risiko energi mulai tahun 2019 dan seterusnya karena permintaan yang terus meningkat sebesar 4,5% per tahun (BBC, 2017).

Dilihat dari penjelasan di atas mengenai respon-respon atas isu proyek pembangunan PLTU di Krabi Thailand, respon dalam bentuk penolakan dilakukan oleh NGO dan masyarakat lokal. Pada kasus ini, Greenpeace khususnya Greenpeace Thailand sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan menjadi salah satu inisiator dalam melakukan penolakan serta langsung melakukan aksi di lokasi tempat akan dibangunnya PLTU tersebut.

2.4. Greenpeace Thailand

Berdiri pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 15 September. Organisasi Greenpeace berawal dari sekumpulan aktivis yang pada saat itu sedang berlayar dari Vancouver, Kanada menuju pulau Amchitka, Alaska yang mana akan terjadi uji coba bom nuklir oleh Amerika Serikat. Greenpeace pada awalnya merupakan nama kapal nelayan bekas yang digunakan para sekumpulan aktivis ini untuk berlayar. Meskipun uji coba bom nuklir ini pada akhirnya dilaksanakan pada 2 November 1971, kehadiran Greenpeace mampu membatalkan uji coba bom tersebut yang telah ditunda selama lima bulan dan menjadi sorotan media pada saat itu (Bigelow, 2023).

Sebelum menjadi Greenpeace, para pendirinya menamakan kelompok mereka bernama The Don't Make A Wave Committee yang terdiri dari Jim

Bohlen, Irving Stowe, Bob Hunter, dan Paul Cote (Weyler, 2021). Greenpeace merupakan contoh organisasi gerakan yang menggabungkan kritik terhadap kapitalisme dan politik Perang Dingin dengan kepekaan lingkungan yang kuat. Greenpeace dinilai sangat cerdas karena memasukan jurnalis dan tokoh media dalam organisasinya. Meskipun pemimpinnya dari latar belakang profesional kelas menengah namun, Greenpeace merupakan sosok yang inklusif dan terbuka. Di negara kelahirannya yakni Kanada, Greenpeace telah melakukan banyak hal penting dalam 30 tahun pertama keberadaannya. Hal ini meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan hidup yang berkaitan dengan Perang Dingin, kapitalisme global dan konsumerisme, serta kesulitan-kesulitan yang melekat dalam mengawasi operasi seperti perburuan paus. Sebagai sebuah gerakan, gerakan ini memiliki jangkauan internasional yang lebih besar dibandingkan gerakan lain yang berasal dari Kanada (Belshaw, 2016, 396). Sekarang Greenpeace dapat ditemukan di sekitar 57 negara dengan ribuan staf dan sukarelawan, serta puluhan juta pendukung serta memiliki empat misi utama yaitu; melindungi keanekaragaman hayati dalam segala bentuknya; mencegah pencemaran dan penyalahgunaan laut, daratan, udara, dan air tawar di bumi; mengakhiri semua ancaman nuklir; mempromosikan perdamaian, pelucutan senjata global dan anti kekerasan (Greenpeace, n.d.).

Pada tahun 1944, Greenpeace Internasional melakukan kampanye global terkait permasalahan pembuangan limbah berbahaya dari negara industri ke negara-negara berkembang yang disebut *Toxic Trade Campaign*. Kampanye ini menjadi titik awal ekspansi Greenpeace ke wilayah Asia, dengan melakukan

penelitian dan menjalin kontak serta jaringan dengan kelompok dan masyarakat setempat. Greenpeace menemukan bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Negara-negara di Eropa, serta Jepang mengimpor limbah berbahaya ke negara-negara seperti Filipina, Indonesia, dan Thailand (Rosal, 2010).

Di wilayah Asia Tenggara, Greenpeace resmi berdiri tepat pada 1 Maret tahun 2000 dan pertama kali memiliki kantor di Thailand pada 3 Mei 2001 (Greenpeace Thailand, n.d.). Dalam melakukan aktivitas menjaga dan melestarikan lingkungan Greenpeace Thailand memiliki lima misi utama, antara lain adalah:

1. Krisis iklim, dalam mengatasi krisis iklim, Greenpeace Thailand mengkampanyekan penggunaan energi rendah karbon di sektor industri dan sektor perkotaan, mengubah sistem pangan yang lebih fokus pada sayuran dibanding hasil produksi peternakan, dan melindungi hutan dengan target deforestasi hingga mencapai angka nol.
2. Transisi menuju energi bersih dan adil, Greenpeace Thailand berkampanye untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, penghapusan penggunaan batu bara, serta mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya transisi energi.
3. Keanekaragaman hayati, Greenpeace Thailand menyuarakan penggundulan hutan yang terjadi di Wilayah Utara Thailand, menyuarakan sistem pertanian ekologis sebagai jawaban dari sistem produksi pangan

yang minim kerugian, dan menyuarakan ketahanan atau kedaulatan pangan kepada Pemerintah Thailand.

4. Laut dan samudera, Greenpeace Thailand berfokus pada hak-hak bagi masyarakat pesisir dan buruh di industri perikanan.

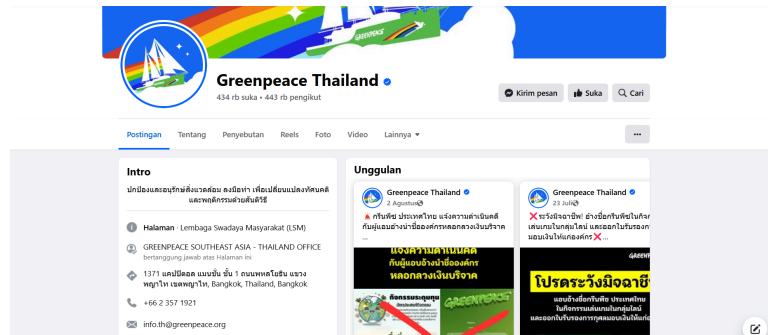
5. Polusi plastik, dalam misi ini Greenpeace Thailand mengkampanyekan isu krisis plastik hingga ke akarnya yaitu produsen, menuntut Pemerintah Thailand untuk membuat kebijakan mengurangi sampah plastik dari sumbernya, dan menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk mewujudkan perjanjian plastik global (Greenpeace Thailand, n.d.).

Greenpeace Thailand juga aktif dalam menggunakan internet sebagai media dalam melakukan aktivitasnya seperti situs web dan sosial media seperti Facebook dan Instagram yang dapat dilihat di **gambar 2.3, 2.4, dan 2.5.**



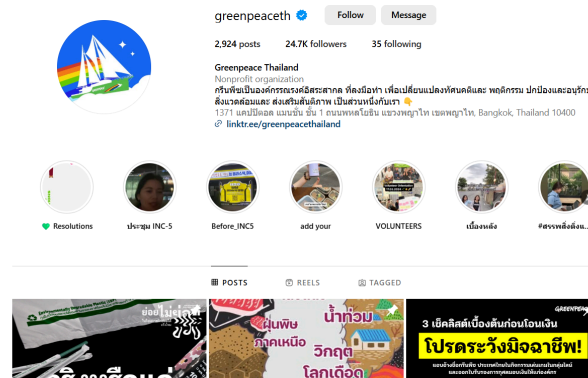
Gambar 2.7. Laman situs Greenpeace Thailand

Sumber: Greenpeace Thailand, 2024.



Gambar 2.8. Laman Facebook Greenpeace Thailand

Sumber: Facebook Greenpeace Thailand, 2024.



Gambar 2.9. Laman Instagram Greenpeace Thailand

Sumber: Instagram Greenpeace Thailand, 2024.

Kebijakan Pemerintah Thailand dalam membangun proyek PLTU batu bara di Krabi memang bertujuan untuk mengatasi masalah kelistrikan di wilayah tersebut. Akan tetapi, menjadikan batu bara sebagai satu-satunya jawaban merupakan keputusan yang kurang tepat, hal ini dilihat dari kondisi wilayah Krabi itu sendiri yang mana memiliki lokasi wisata dengan kunjungan dari wisatawan mancanegara dan terdapat area yang terdaftar di perjanjian lahan basah internasional serta dilihat dari respon-respon oleh berbagai pihak yang

menunjukkan pertentangan atas proyek tersebut. Di sisi lain, Greenpeace Thailand turut hadir dengan melakukan upaya-upaya untuk menolak pembangunan PLTU batu bara Krabi. Oleh karena itu, pembahasan komprehensif terkait upaya Greenpeace Thailand akan dibahas pada bab selanjutnya.